



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor .. Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor ..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pengelolaan

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.553.389.469.002,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp396.394.985.484,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp326.300.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.740.928.250,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.308.410.992,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.045.646.242,00 (tujuh miliar empat puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp326.300.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. pajak air tanah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah);
 - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah);
 - e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp107.300.000.000,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus juta rupiah);
 - f. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.740.928.250,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp48.212.746.945,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp5.552.381.305,00 (lima miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp7.975.800.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.308.410.992,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp1.308.410.992,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Lain ...

- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.045.646.242,00 (tujuh miliar empat puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - jasa giro sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.545.646.242,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.156.994.483.518,00 (satu triliun seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas:

- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.065.936.053.000,00 (satu triliun enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah), yaitu dari dana perimbangan sebesar 1.065.936.053.000,00 (satu triliun enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp91.058.430.518,00 (sembilan puluh satu miliar lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yaitu dari pendapatan bagi hasil sebesar Rp91.058.430.518,00 (sembilan puluh satu miliar lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 8

Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.571.889.469.002,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua rupiah) yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal; dan
- belanja tidak terduga.

Pasal 9

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.472.749.081.722,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa;
- belanja subsidi;
- belanja hibah; dan
- belanja bantuan sosial.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp819.952.823.950,00 (delapan ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp429.548.313.676,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp340.633.624.099,00 (tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp34.043.220.116,00 (tiga puluh empat miliar empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu seratus enam belas rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp274.257.996,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - f. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp14.601.408.063,00 (empat belas miliar enam ratus satu juta empat ratus delapan ribu enam puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp597.438.574.219,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang sebesar Rp103.481.828.048,00 (seratus tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah);
 - b. belanja jasa sebesar Rp264.692.389.752.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp31.982.332.803.000,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp86.097.631.000,00 (delapan puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.492.533.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp71.926.522.415,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah);
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp10.994.038.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp25.771.299.201,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja subsidi sebagaimana dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada BUMD sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp52.365.318.553,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - f. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp16.440.572.253,00 (enam belas miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
 - g. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp2.178.759.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - h. belanja hibah dana BOSP sebesar Rp33.745.987.300,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dalam Pasal 9 huruf e direncanakan sebesar Rp2.467.365.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp807.365.000,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah); dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp92.140.387.280,00 (sembilan puluh dua miliar seratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.869.076.858,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar sebesar Rp701.604.660,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus empat ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp8.576.224.500,00 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp1.082.909.620,00 (satu miliar delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - d. belanja ...

- d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp17.458.200,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp5.305.589.170,00 (lima miliar tiga ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp536.151.700,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - g. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp357.792.400,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 - h. belanja modal komputer sebesar Rp3.347.618.300,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah);
 - i. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp1.257.700,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp10.807.320.685,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.135.149.923,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.926.562.214,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp24.660.562.214,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.658.217.108,00 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp18.831.012.208,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp5.190.282.900,00 (lima miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp1.586.922.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.686.531.100,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp164.061.500,00 (seratus enam puluh empat juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja ...

- b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebesar Rp6.022.469.600,00 (enam miliar dua puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 12

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 13

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yaitu dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yaitu dari penghematan belanja sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah), terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp18.500.000.000,00) (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 17

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

- a. lampiran I ...

- a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. lampiran II rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. lampiran IIIa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. lampiran IIIb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- e. lampiran IVa daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. lampiran IVb daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. lampiran Va daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. lampiran Vb daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. lampiran VIa daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. lampiran VIb daftar nama penerima, alamat dan besaran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kota;
- k. lampiran VIc daftar nama penerima, alamat dan besaran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa;
- l. lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. lampiran VII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- n. lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19...

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
Pj. WALI KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

IMAM RANA HARDIANA

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN ... NOMOR

**KOTA SERANG****RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	396.394.985.484,00
4.1.01	Pajak Daerah	326.300.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	10.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	8.483.240.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	8.483.240.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	147.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	147.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	11.760.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	11.760.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.350.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	1.350.000.000,00
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	8.000.000,00
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	8.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	42.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	42.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	42.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	65.000.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	65.000.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	65.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	107.300.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	37.500.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	35.576.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.924.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	56.850.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	56.850.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	7.000.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	6.790.000.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	210.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	1.350.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.350.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4.600.000.000,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	4.570.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	30.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	60.000.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	60.000.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	60.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	40.000.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	40.000.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	40.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	61.740.928.250,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	48.212.746.945,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	41.573.210.945,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	41.573.210.945,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.989.536.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.989.536.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	450.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	225.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	225.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.552.381.305,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.746.861.305,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.890.549.155,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	1.426.312.150,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.202.500.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	40.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	107.500.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	155.520.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	155.520.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	400.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	400.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	7.975.800.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.875.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.875.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	100.800.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	100.800.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.308.410.992,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.308.410.992,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.308.410.992,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.308.410.992,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.045.646.242,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.500.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	2.500.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.545.646.242,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.545.646.242,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	1.545.646.242,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.156.994.483.518,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.065.936.053.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.807.195.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.807.195.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.807.195.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	98.053.225.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	97.095.228.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.232.710.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	95.862.518.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	957.997.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	90.457.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	221.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	23.806.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	843.513.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	674.317.362.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	505.507.048.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	505.507.048.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	168.810.314.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	13.400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.646.275.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	86.510.471.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	59.351.053.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	4.902.515.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	286.758.271.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	13.465.532.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	649.944.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	226.120.000,00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.394.972.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.323.520.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	870.976.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	273.292.739.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	122.635.702.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	933.952.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.382.362.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	379.493.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	12.130.188.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.271.738.000,00
4.2.01.09.02.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.656.344.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	102.314.300.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.027.000.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8.853.600.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	8.977.400.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	270.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.058.430.518,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	91.058.430.518,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.058.430.518,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.597.129.270,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	687.070.911,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	52.774.230.337,00
	Jumlah Pendapatan	1.553.389.469.002,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.472.749.081.722,00
5.1.01	Belanja Pegawai	819.952.823.950,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	429.548.313.676,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	316.586.472.754,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	231.125.406.965,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	85.461.065.789,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.817.166.512,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.974.432.275,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.842.734.237,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.753.766.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.753.766.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.285.537.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.285.537.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.009.821.600,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.022.878.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.986.943.600,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.048.780.319,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.691.497.059,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.357.283.260,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.875.887.274,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.038.677.010,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.837.210.264,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.857.020,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.095.857,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.761.163,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.303.983.461,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.115.721.634,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.188.261.827,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.508.238.515,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.294.509.342,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	213.729.173,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.227.438.221,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.601.955.059,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	625.483.162,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.126.365.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.481.310.000,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.645.055.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	340.633.624.099,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	180.604.556.461,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	174.647.923.961,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.956.632.500,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	17.941.164.492,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.864.355.242,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	76.809.250,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.546.904.422,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.546.904.422,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	139.540.998.724,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	2.762.500.000,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	338.400.949,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	1.640.000.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	204.000.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	356.957.500,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	2.055.000.000,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	37.400.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	38.930.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.862.948.033,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.950.036.342,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.870.000.000,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	171.774.400,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	84.240.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	77.000.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	15.787.500,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	365.000.000,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.220.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	122.635.702.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	933.952.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.136.150.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.043.220.116,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	106.346.422,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	106.346.422,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	146.531.014,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	146.531.014,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	102.911.032,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	102.911.032,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	160.363.406,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	160.363.406,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	27.243.746,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	27.243.746,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	13.782.500.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	140.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.800.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.700.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	13.632.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.056.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.056.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	99.999.996,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	99.999.996,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	274.257.996,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.400,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.400,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.293.292,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.293.292,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6.544,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6.544,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00
5.1.01.05.10.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	97.377.600,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	73.617.600,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	23.760.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	14.601.408.063,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	14.601.408.063,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	14.601.408.063,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.438.574.219,00
5.1.02.01	Belanja Barang	103.481.828.048,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	95.565.830.348,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.842.160.456,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	533.609.382,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.129.036.670,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	29.966.200,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	467.602.425,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.650.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	7.842.800,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.350.433.700,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.981.305.300,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	447.500.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	104.340.700,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	178.954.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.754.421.869,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.334.533.622,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.251.582.662,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	370.450.900,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	499.284.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.246.778.327,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.032.788.561,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	251.851.083,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	392.816.060,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.641.100,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.207.320.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.622.375.131,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.197.996.700,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	869.776.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.502.953.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	44.550.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.495.025.600,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.588.500.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	136.860.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	814.450.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.034.135.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	58.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	517.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	125.260.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	232.973.800,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	454.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	276.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	554.800.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	543.304.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	446.677.700,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	410.000.000,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	2.500.000,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	20.457.500,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.647.200,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	73.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.469.320.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0073	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	4.000.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	696.800.000,00
5.1.02.01.04.0250	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	145.000.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00
5.1.02.01.04.0515	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	6.323.520.000,00
5.1.02.01.04.0545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	200.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	264.692.389.752,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	210.902.208.052,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	259.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.829.200.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	156.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	409.440.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	144.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.013.600.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.559.915.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	96.180.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	32.132.608.004,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.765.100.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.760.400.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	735.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.302.700.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	5.188.800.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	456.800.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	455.100.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.290.550.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.700.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.491.690.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.347.400.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.028.950.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.218.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	477.900.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	13.007.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	220.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.045.650.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	122.430.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	222.620.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	330.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.439.659.974,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	204.200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	99.600.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.670.400.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.222.950.742,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.298.450.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	151.110.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	874.454.332,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.104.110.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	48.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.582.760.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	112.080.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	24.667.383.376,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	19.506.060.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.680.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.928.876.328,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	236.656.800,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	296.253.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.019.537.248,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.954.728.700,00
5.1.02.02.04.0007	Belanja Sewa Compacting Equipment	368.250.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	16.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	6.900.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	199.478.800,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	681.660.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.195.539.900,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	12.900.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	450.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.080.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.215.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	730.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	368.000.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	90.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	77.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	163.000.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	124.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	39.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.120.127.455,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.447.760.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	175.500.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	302.854.500,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.564.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.385.200.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	47.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.428.371.720,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	53.500.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	389.189.500,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	326.751.735,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.934.291.319,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	8.000.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	290.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	849.181.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.948.406.819,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.410.703.500,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	16.000.000,00
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an	212.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	55.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	5.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	50.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.349.715.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.933.022.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	416.693.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.465.935.850,00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	487.500.000,00
5.1.02.02.13.0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	330.000.000,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	59.717.815,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	285.000.000,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	36.000.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	62.992.500,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	345.000.000,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	6.600.000,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.870.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	328.755.535,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	517.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.982.332.803,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	253.800.000,00
5.1.02.03.01.0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	223.800.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	30.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.043.108.083,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	34.000.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	58.700.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.906.482.225,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.784.871.238,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	471.980.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	320.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	115.200.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	40.200.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	92.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.504.379.620,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	48.100.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	139.520.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.500.000,00
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	10.500.000,00
5.1.02.03.02.0176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	206.000.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	39.701.000,00
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	112.600.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.194.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.180.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.685.424.720,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.877.426.520,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	205.340.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	8.270.000.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	80.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.240.000.000,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	12.658.200,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	86.097.631.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.097.631.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.825.453.800,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.750.946.200,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21.208.926.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.312.305.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.492.533.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.485.708.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.485.708.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.825.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.825.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	71.926.522.415,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	71.284.273.415,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	70.632.913.945,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	651.359.470,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	393.021.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	333.021.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	249.228.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	249.228.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.994.038.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.994.038.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.994.038.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.771.299.201,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.771.299.201,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.771.299.201,00
5.1.04	Belanja Subsidi	525.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	525.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	525.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	525.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	52.365.318.553,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.440.572.253,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.611.792.253,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.810.892.253,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	800.900.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.005.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.005.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.780.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.780.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	43.780.000,00
5.1.05.05.04.0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	43.780.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.178.759.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.178.759.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.178.759.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	33.745.987.300,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	16.390.087.300,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	16.390.087.300,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	8.403.600.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	8.403.600.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	8.952.300.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	8.952.300.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.467.365.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	807.365.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	450.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	450.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	357.365.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	357.365.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.560.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.560.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.560.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	100.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	92.140.387.280,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.900.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.900.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.900.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.900.000.000,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00
5.2.01.01.02.0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.869.076.858,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	701.604.660,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	559.901.360,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	559.901.360,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	141.703.300,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	12.395.600,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	99.722.600,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	29.585.100,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.576.224.500,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.576.224.500,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.562.393.600,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.363.830.900,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	150.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.082.909.620,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	879.980.100,00
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	1.887.400,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	873.092.700,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	202.929.520,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	125.000.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	77.929.520,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	17.458.200,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	17.458.200,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.458.200,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	15.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.305.589.170,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.197.108.100,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	70.782.300,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.126.325.800,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.947.824.610,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.145.937.095,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	1.204.200,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	86.504.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	882.753.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	62.507.315,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	718.321.200,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	50.597.800,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	160.656.460,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	18.000.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	18.127.660,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	44.528.800,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	80.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	536.151.700,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	536.151.700,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	193.932.700,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	342.219.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	357.792.400,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	87.192.400,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	31.468.700,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	55.723.700,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	270.600.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	171.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	99.600.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.347.618.300,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.982.632.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.668.132.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	314.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	364.985.800,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	152.378.700,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.476.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	192.131.100,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.257.700,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.257.700,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	1.257.700,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	10.807.320.685,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	10.652.894.685,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	10.064.225.455,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	588.669.230,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	108.554.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	108.554.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	45.872.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	45.872.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.135.149.923,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.135.149.923,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.135.149.923,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.926.562.214,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	24.660.562.214,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.660.562.214,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.968.731.434,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.901.290.780,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.270.540.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.400.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	150.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	70.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	700.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	155.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	155.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	155.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	111.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	111.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	111.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.658.217.108,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	18.831.012.208,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	18.201.012.208,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	12.560.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	5.641.012.208,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	630.000.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	630.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.190.282.900,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.694.000.000,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	2.694.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.614.972.000,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.614.972.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	881.310.900,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	420.000.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	461.310.900,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	50.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	50.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	50.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.586.922.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.586.922.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.586.922.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.686.531.100,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	164.061.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	164.061.500,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	55.120.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	108.941.500,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.022.469.600,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.014.044.600,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	5.892.073.300,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	121.971.300,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	8.425.000,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	8.425.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.500.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	100.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.571.889.469.002,00
	Total Surplus/(Defisit)	-18.500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	30.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	30.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	6.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	19.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.500.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	18.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Serang,

Pj Walikota

